turan itu terjadi bahkan sampai di tingkat ideologis yang didasari kepentingan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara di satu pihak (yaitu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi) dan usaha masyarakat setempat untuk mempertahankan akses tradisional mereka terhadap sumber daya hutan.

Sangatlah sulit untuk menemukan titik-titik kelemahan, teoretis maupun konseptual, dalam buku ini. Kalau pun ada kekurangan barangkali oleh karena posisi Peluso yang cenderung berpihak dalam melihat permasalahan-permasalahan di seputar perambahan hutan. Keberpihakan terhadap masyarakat lokal ini menyebabkan Peluso lupa untuk lebih mencermati sistem pengelolaan hutan secara tradisional. Belum dapat dibuktikan secara ekologis apakah sistem pengelolaan hutan secara tradisional itu benar-benar merupakan sistem yang telah sesuai (*adapted*) dalam konteks ekosistem lokal.

Buku ini perlu dibaca oleh para sejarawan, khususnya yang berminat pada sejarah lingkungan, karena buku ini memperlihatkan suatu kerangka metodologis penting yang justru banyak dilupakan oleh para sejarawan sendiri. Kerangka itu adalah perlunya membingkai suatu peristiwa sejarah dengan bantuan dari disiplin ilmu lain. Peluso menggabungkan dua teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu yang antropologis dan historis (pengumpulan data-data tertulis). Peluso mampu menampilkan kenyataan bahwa peristiwa sejarah dapat memiliki beberapa nuansa sosial. Oleh karena itu, suatu peristiwa sejarah, dalam hal ini perlawanan masyarakat lokal, dapat dijelaskan dari beraneka ragam pendekatan yang dipakai. Dengan demikian, ilmu sejarah dapat menjadi aktual tanpa harus meninggalkan cirinya, yaitu kesadaran yang tinggi terhadap dimensi waktu.
(Fadjar Ibnu Thufail—PMB-LIPI)

Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945.* Jakarta: Grasindo,1993, xxxv + 563 hal.

Ketercengangan banyak orang belum selesai ketika menyaksikan banyak peristiwa penting di tahun-tahun pertama Proklamasi Indonesia ternyata bersumber pada ketegangan-ketegangan sosial yang terakumulatif di zaman Pendudukan Balatentara Jepang di Indonesia (1942–1945). Apalagi setelah tiga orang ilmuwan Australia memberikan cakrawala baru melalui hasil penelitian yang relatif agak berbeda dengan yang pernah dikerjakan Harry J. Benda, George Mc Kahin, maupun Benedict R.O.G. Anderson. Adalah Anthony Reid, Micheil Van Langenburg, dan Anton Lucas, yang meneropong pertentangan antara kelas yang berkuasa dengan rakyat lapisan bawah yang berwujud dalam bentuk revolusi sosial yang rupanya bibit-bibitnya sudah menjadi matang melalui berbagai akibat yang ditimbulkan dalam kebijaksanaan pemerintahan pendudukan Jepang.

Hampir tiga dasawarsa setelah penyerahan Jepang, bibit-bibit itu tetap masih belum menjadi perhatian para ilmuwan, antara lain karena langkanya bahan-bahan mengenai zaman Jepang, dan di pihak lain perhatian para ilmuan lebih banyak diarahkan kepada aspek makro dalam periode pendudukan ini.

Di awal tahun 1970 semangat untuk melakukan studi zaman Jepang mulai menampakkan garis menaik. Satu kesimpulan yang dapat ditarik dari gejala itu adalah bahwa sebagian besar ilmuwan dalam melakukan studi zaman pendudukan Jepang ini lebih banyak menfokuskan dirinya untuk melihat tingkah laku kalangan atas. Ketiadaan bahan atau karena terbatasnya kemampuan orang

asing untuk mengakses bahan-bahan yang terbatas dalam bahasa Jepang dan berada di negeri Sakura, telah mendorong pula penggumpalan data lisan melalui wawancara sejarah lisan. Namun sebagaimana kecenderungan sebelumnya, titik perhatian masih berada kepada kalangan para pemimpin dan kaum elite sebagai pelaku sejarah, dengan lokasi yang umumnya ada di sektor perkotaan.

Berhadapan dengan kenyataan itu, Dr. Aiko Kurasawa, yang pernah menjadi staf ahli pada Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dan sekarang menjadi pengajar pascasarjana pada The School of International Development, Universitas Nagoya, di Jepang, sejak menjadi mahasiswa Universitas Tokyo menjelang tahun 1970-an, sudah tertarik terhadap masalah pendudukan Jepang di Indonesia ini. Minatnya berawal dari Pemberontakan Peta Blitar. Mungkin tergerak oleh kenyataan bahwa sebagian besar pelaku pemberontakan Peta ini adalah para prajurit yang berasal dari kalangan bawah, maka pada kesempatan studi lanjutannya mengenai pendudukan Jepang di Jawa, Aiko menfokuskan studinya terhadap perkembangan-perkembangan dan tanggapan-tanggapan lapisan masyarakat bawah ini.

Karena itu, adalah tujuan pokok Aiko untuk menganalisis perubahan-perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan psikologis sebagai akibat serangkaian kebijakan pemerintahan Pendudukan Jepang (1942–1945) terhadap masyarakat pedesaan di Jawa. Dasar kebijakan itu dicarinya melalui konsep budaya politik Jepang dalam memobilisasi massa yang disebut sebagai *Doin*, yang kira-kira berarti memanfaatkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Cuma saja istilah ini pernah disalahgunakan dalam pengertian memeras, mengumpulkan, memindahkan barang serta komoditi sesuai dengan rencana sebelumnya. Dalam konteks yang lain, istilah ini juga berarti memanggil rakyat untuk berpartisipasi dalam pengabdian militer, pekerjaan umum, kegiatan-kegiatan politik atau seremonial. Dengan kata lain *Doin* diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintahan pendudukan yang dalam konsep Ilmu Politik dikenal sebagai mobilisasi dan partisipasi.

Konsep mobilisasi tidak akan punya arti apa-apa jika tidak dihubungkan dengan saudara kembarnya: "kontrol". Lagi-lagi Aiko menemukan padanannya dalam konsep budaya politik Jepang sebagai *Tosei* atau pengawasan dari yang memerintah terhadap rakyatnya melalui peraturan dan dekrit. Dalam kegiatan politik pada masa pendudukan Jepang, *Tosei* ini berarti pengaturan terhadap kebebasan melaksanakan kegiatan ideologi, ekpresi, dan kegiatan politik praktis. Dalam kegiatan ekonomi, *Tosei* diterjemahkan sebagai pengawasan yang ketat terhadap kegiatan produksi, sirkulasi, dan jalur distribusi terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu.

Doin dan *Tosei* inilah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah perangkat dalam mengolah disertasi Aiko Kurasawa di Cornell University (1987), dan kemudian ia terbitkan di bawah judul *Mobilization and Controls*. Buku ini dipersembahkan kepada pembaca Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan judul baru: *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942–1945*. Buku setebal 563 halaman ini dialihbahasakan oleh seorang peneliti LIPI, Drs. Hermawan Sulistyo MA, dan diterbitkan melalui kerja sama Yayasan Karti Sarana–PT Gramedia, 1993.

Untuk mempersiapkan tulisan ini, Aiko telah mengadakan serangkaian kunjungannya ke Indonesia, termasuk hampir empat setengah tahun dengan tekun melakukan penelitian dan berwawancara dengan para pelaku kalangan bawah ini di pedalaman Jawa, di tempat ia dapat menangkap esensi dari penerapan kebijakan sosio-ekonomi Jepang, dan bagaimana tanggapan rakyat jelata terhadapnya (xvii).

Untuk dapat memahami dampak kebijakan pendudukan militer Jepang di Jawa itu, ia memerlukan pendekatan terhadap berbagai aspek. Di samping penelitian terhadap kebijakan-kebijakan sosial ekonomi, dipertimbangkannya juga serangkaian perangkat yang

dipergunakan pemerintah Jepang untuk menarik rakyat agar mau bekerja sama dengan mereka seperti: propaganda, pendidikan, dan mobilisasi politik melalui kelembagaan sosial dan semi militer yang sengaja diciptakan Jepang.

Suasana perang dan terhentinya kegiatan perdagangan luar negeri melalui ekspor dan impor, telah mendorong pemerintah pendudukan untuk mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mengontrol produksi, dan pengawasan yang ketat terhadap distribusi komoditi dan pemasarannya, dan memaksa penduduk desa untuk menyesuaikan dengan situasi baru ini dengan cara penyerahan paksa dan penjatahan bahan makanan. Kebijaksanaan ini dibarengi dengan ekploitasi tenaga kerja melalui romusha, dan menciptakan lembaga rukun tetangga yang baru, Tonarigumi dan koperasi pedesaan, *Nogyo Kumiai*, sebagai salah satu alat untuk merekrut tenaga kerja tersebut.

Untuk mencari pembenaran terhadap kebijakan itu dan didorong oleh eskalasi tuntutan perang mereka, Jepang berusaha merangkul para pemimpin masyarakat di tingkat atas, dan melalui mereka dihasilkan program dan justifikasi pelaksanaanya. Sebagai penghubung antara kalangan atas ini dengan rakyat jelata, disiapkan seperangkat rombongan baru, dan mereka bekerja efektif setelah menerima kursus, latihan, propanda, dan indoktrinasi yang sistematis. Hal ini ini sekaligus dibarengi dengan kebijakan lain dengan cara mengorganisasi organisasi massa di pedesaan melalui Seinendan, Keibodan, Fujinkai, dan sebagainya. Dengan gambaran singkat itu akan terlihat ada mata rantai jaringan kebijakan yang terintegrasi satu sama lain dari atas ke bawah yang pada muaranya terletak rakyat jelata di pedesaan. Dampak dari kebijakan berantai itu terhadap masyarakat desa Jawa itulah yang menarik perhatian Aiko.

Di samping uraian klasik yang sudah banyak dikemukakan mengenai kesengsaraan dan kemelaratan rakyat, Aiko secara khusus menemukan dampak yang lebih serius, yakni koyaknya gambaran terhadap pangreh praja dan munculnya krisis kepemimpinan di desa, serta reaksi fisik dari lapisan bawah terhadap kekuasaan Jepang dalam bentuk pemberontakan petani di Sukamanah Tasikmalaya, dan Indramayu.

Dalam batas-batas tertentu, masyarakat Jawa memang memandang kekuasaan pemimpin formal mereka sebagai titisan dari kekuasaan Tuhan. Dan karena itu pula hubungan tuan-hamba dipatrikan dalam *kawula-gusti*. Pegawai pedesaaan yang berada langsung dengan rakyat, tidak lebih dari perpanjangan tangan penguasa lokal dan dalam arti lebih luas perpanjangan tangan kekuasaan formal itu pula. Karena itu kewenangan dan kewibawaan, dan atribut kebangsawaan mereka harus dijaga. Orang Jawa cenderung berpikir bahwa orang yang memerintah harus mempunyai kewenangan, kewibawaan yang kuat, dan menumbuhkan keseganan rakyatnya (hlm. 421). Ia harus hidup dengan gemerlapan dan bertingkah laku berbeda dari rakyat biasa. Menjaga jarak dengan rakyat jelata dalam batas-batas tertentu adalah perwujudannya. Pemerintah kolonial Belanda secara cerdik memanfaatkan tradisi ini untuk kepentingan politik mereka. Sebaliknya Jepang yang otoritatif, berkeinginan untuk meningkatkan kepraktisan dan efisiensi pegawai negeri. Ada kesan bahwa Jepang ingin "mendemokratisasi" pangreh praja dengan mengurangi warna tradisional dan aristokrasi mereka. Karena itu Jepang tidak ragu-ragu memasukkan elemen-elemen baru ke dalam korps pangreh praja tersebut. Dalam pelaksanaan keseharian dalam tugas-tugas mereka, Jepang mendorong pangreh praja, terutama pada jenjang yang paling rendah, untuk bersikap praktis dan kurang berwibawa.

Di samping itu, sebagian besar birokrat-birokrat Jepang yang memperoleh latihan di Korea dan Taiwan, serta berbekal dengan latar belakang budaya Jepang, memerintahkan penguasa-penguasa Indonesia (umumnya camat-camat atau *Soncho* ke bawah yang disebut *Kucho* atau kepala desa) turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk

menjelaskan kebijakan, memberi contoh pelaksanaan, dan bertindak atas nama pemerintah melaksanakan penyerahan paksa dan penjatahan makanan. Kontak langsung dengan masyarakat pedesaan ini secara langsung pula memunculkan dampak negatif. Pertama, berkurangnya keseganan masyarakat terhadap pangreh praja yang kemudian menyebabkan berkurang pula penghormatan dan gengsi pangreh praja dalam pandangan petani. Kedua, pengamatan langsung atas tingkah laku pangreh praja yang sudah dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, menciptakan penilaian negatif di mata petani, dan mengusik kebencian mereka terhadap mereka. Faktor-faktor di atas, makin diperkuat dengan gaya hidup para pangreh praja yang tidak lagi gemerlap, kurang makmur, bahkan ada yang miskin yang terpaksa mereka jalani karena kondisi perang. Dilarangnya pendidikan dan pemakaian bahasa Belanda memperburuk kesan terhadap pangreh praja. Apalagi ada kesan bahwa pangreh praja mulai terbuka bagi setiap orang setelah melalui ujian dan pengabdian berdasarkan kemampuan (hlm. 423).

Jalur distribusi barang yang melalui garis mereka, memungkinkan pangreh praja memiliki akses khusus yang ternyata banyak dimanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri, pengurangan catu, keterlibatan di pasar gelap, suap sebagai imbalan bagi izin yang tidak sah, adalah beberapa contoh saja dari menurunnya krisis kepemimpinan mereka (hlm. 426).

Gambaran tradisonal dan aristokrasi atas pangreh praja terkoyak dan mereka kemudian berubah menjadi tokoh yang ditakuti dan dibenci rakyat. Dendam masyarakat desa terhadap pangreh praja yang berlebihan itu pada tempat-tempat tertentu memunculkan reaksi yang spontan dalam bentuk pemberontakan petani. Aiko memberikan uraian yang panjang lebar mengenai reaksi petani itu dengan mengambil dua contoh kongkret atas pemberontakan petani di Indramayu tahun 1944, ketika dua orang camat (*Sonco*) dan orang-orang mereka diserang di tengah-tengah pengumpulan padi. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ketika seorang *Sonco* yang bersemangat menggeledah beras yang disembunyikan di rumah-rumah petani, dirampok dan dibunuh para petani di rumahnya dengan bambu runcing pada tahun 1945.

Terkoyaknya gambaran terhadap pangreh praja itu menyebabkan masyarakat desa menoleh kepada tokoh informal mereka seperti tokoh-tokoh agama Islam, yang secara kebetulan memperoleh tempat tertentu dalam kebijakan Jepang. Hubungan antara kemelaratan, tertekan, kebencian, dendam di satu pihak, dan pada tempat lain sentimen-sentimen keagamaan, telah menghasilkan arus bawah yang sangat kuat. Salah satu di antaranya berubah arah menjadi reaksi fisik dari petani yang terkenal dengan Pemberontakan Pesantren Sukamanah di Tasikmalaya (hlm. 457). Dengan demikian kata penulis buku ini bahwa pendudukan militer Jepang bertanggung jawab atas munculnya perubahan sosial dan reaksi yang muncul dari masyarakat pedesaan ini.

Apa yang dikatakan Aiko memang tidak berlebihan. Berubahnya pandangan masyarakat terhadap pangreh praja, khususnya dari mereka yang berasal dari kalangan aristokrasi, sebagaimana sudah disinggung di awal timbangan ini, terbukti menjadi andil pemicu gerakan sosial di awal proklamasi. Kerinduan terhadap perlakuan privilege pada masa kolonial Belanda dan sikap Jepang dan masyarakat desa pada mereka, menjadi salah satu penyebab kasus-kasus Banten, Peristiwa Tiga Daerah di Pekalongan, Bojonegoro, Banyuwangi, Banyumas, dan Tangerang. Dengan demikian terlihat korelasi antara terakumulasinya sebab-sebab di zaman pendudukan Jepang, dengan meletusnya berbagai gerakan sosial pada tahun-tahun sesudahnya.

Jika ingin dilihat secara umum, di sinilah sumbangan yang berharga dari hasil jerih payah Aiko Kurasawa dalam perbendaharan pengetahuan sosial di Indonesia. Mantan ketua jurusan studi Indonesia pada Setsunan University, Osaka ini, bukan hanya berhasil meng-

gambarkan suasana pedesaan dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masa pendudukan Jepang ini, juga temuannya itu akan dapat dijadikan alat untuk menganalisis gejala susulan sesudahnya. Dalam berbagai tempat masih terkesan masih banyak bahan yang tercecer yang ternyata bermunculan setelah Aiko selesai dengan studinya, dan sebaliknya melalui bahan-bahan yang sudah diperolehnya terlihat bahwa pengguna sumber pada tempat-tempat tertentu sering terperangkap oleh sumbernya. Gejala semacam ini sebenarnya adalah gejala biasa pada peneliti ilmu sosial, namun sebagai karya disertasi, ia melebihi semua karya sezamannya bahkan dengan batas periode penelitian yang sama.

Buku ini menjadi mudah dibaca, bukan hanya karena bahasanya yang cukup mengalir, juga karena penerjemahnya memang sangat akrab dengan jenis karya seperti ini. Dengan latar belakang pengetahuan Ilmu Politik dan kemudian dilanjutkan dengan Ilmu Sejarah, pengalih bahasa ini terlihat memang sangat fasih memakai instrumen peralatan pengetahuannya.

Buku ini bukan hanya baik untuk menambah perbendaharaan pengetahuan sejarah pada periode ini, temuan-temuan Aiko, khususnya yang berhubungan dengan tingkah laku pangreh praja, dalam batas-batas tertentu masih relevan untuk dipakai dalam mengamati dan menganalisis peranan pamong praja kita di masa sekarang. **(JR Chaniago—Arsip Nasional)**

Desiree Zuraida, Jufrina Rizal, (eds), *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-pokok Pikiran Selo Soemardjan.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Buku ini terbagi atas 3 bab, pertama berisi arti- kel-artikel yang ditulis oleh Selo, kedua berisi karangan dari koleganya dan ketiga adalah kesan-kesan dari asistennya. Pembagian ini dipergunakan sebagai kerangka untuk melihat Selo. Kerangka yang tepat dalam sebuah bedah buku adalah masalah yang rumit. Ada 3 masalah yang muncul dari pembagian bab buku ini yang perlu dipikirkan; pertama Selo Soemardjan dan ide-idenya, kedua Selo Soemardjan dalam pandangan lingkaran dekatnya (salah satu), ketiga visi buku ini. Sebagai seorang tokoh Selo tampak "besar". Kebesarannya tampak pada posisinya sebagai "pion" ilmuwan sosial, penulis tidak berhasil mencari artikel yang melawan Selo. Selo tidak hanya pion tetapi juga "raja". Bahkan dalam sisi tertentu Selo turut mewarnai dasar sumbangan dari ilmuwan sosial dalam kancah pembangunan di Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia.

Dengan demikian harus diakui kesulitan untuk menghilangkan bias dari "image" kebesaran dari Selo Soemardjan. Penulis membaca buku ini dalam urutan terbalik, bab terakhir menjadi bab pertama dan seterusnya. Jika membaca buku ini berurutan seperti pembagian bab ini maka kesulitan memisahkan diri dari bias lebih besar dibanding sebaliknya. Bab terakhir yang menceritakan kesan salah satu kalangan dekatnya sebenarnya memperlihatkan ungkapan polos apa adanya mengenai Selo. Dalam ungkapan seperti itu Selo Soemardjan tampak sebagai manusia biasa. Dengan demikian penulisan bedah buku ini menggunakan urutan terbalik; pertama menceritakan mengenai "Selo Bapak yang Baik" kemudian "Selo, Ilmuwan Sosial", "Selo Intektual yang Kesepian", dan yang terakhir adalah gambaran singkat mengenai visi buku ini.

Selo Bapak yang Baik

Hubungan Selo dengan salah satu kalangan dekatnya, yaitu asisten-asistennya adalah